

SKRIPSI

PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA MENJAGA KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

TIARA

2210112166

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

Prima Widya Putri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026



No. Alumni Universitas	Tiara	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Peranap/ 10 Januari 2004	f. Tanggal Lulus : 22 April 2026	
b. Nama Orang Tua : Kawardi, Jauhari	g. Prediket Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan	
d. PK : Hukum Tata Negara	i. IPK : 3,74	
e. No. BP : 2210112166	j. Alamat : Kp. Bancah Laweh, Jr. Bancah Laweh	

PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA MENJAGA KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Tiara, 2210112166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 73 Halaman + xi, 2026)

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemandirian kedua lembaga ini menjadi syarat utama dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih membuka ruang intervensi politik, khususnya pada tahap *fit and proper test* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keterlibatan DPR pada tahap ini berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian karena DPR merupakan lembaga politik yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemilu. Fenomena munculnya dugaan penentuan nama calon sebelum pelaksanaan uji kelayakan serta adanya afiliasi politik calon dengan elite partai memperkuat kekhawatiran terhadap menurunnya kemandirian penyelenggara pemilu dan berkurangnya kepercayaan publik. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: *Pertama*, mengapa mekanisme *fit and proper test* dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu mempengaruhi kemandirian lembaga penyelenggara pemilu? *Kedua*, bagaimana mekanisme *fit and proper test* ideal dalam rekrutmen calon anggota lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas? Upaya dalam permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menawarkan alternatif mekanisme seleksi dengan mengurangi jumlah calon yang diajukan kepada DPR menjadi jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, yakni tujuh calon anggota KPU dan lima calon anggota Bawaslu. Apabila terdapat calon yang tidak memenuhi kualifikasi, DPR dapat meminta kembali kepada Tim Seleksi untuk mengirimkan calon anggota KPU dan Bawaslu untuk dilakukannya *fit and proper test* oleh DPR sesuai dengan kekurangan jumlah kuota jabatan. Model ini diharapkan mampu meminimalisasi intervensi politik sekaligus tetap menjaga prinsip *check and balances* antar lembaga negara serta memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu.

Kata kunci: kemandirian penyelenggara pemilu, seleksi KPU dan Bawaslu, intervensi politik.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 22 April 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji	Penguji
Nama Terang	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.	Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alm nus:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:



No. University Alumni	Tiara	No. Faculty Alumni
a. Place/Date of Birth : Peranap/January 10 th , 2004	f. Graduation Date : April 22 st , 2026	
b. Parents' Name : Kawardi, Jauhari	g. Pass Predicate : With Honors	
c. Faculty : Law	h. Study Durations : 3 Years 8 Month	
d. CP : Constitutional Law	i. GPA : 3,74	
e. No. BP : 2210112122	j. Address : Kp. Bancah Laweh, Jr. Mudik Simpang	

IMPLEMENTATION OF THE FIT AND PROPER TEST FOR CANDIDATE MEMBERS OF THE GENERAL ELECTION MANAGING INSTITUTION BY THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN AN EFFORT TO MAINTAIN THE INDEPENDENCE OF THE GENERAL ELECTION MANAGEMENT INSTITUTION

(Tiara, 2210112166, Faculty of Law, Andalas University, Concentration Program Constitutional Law, 73 Pages + xi, 2026)

ABSTRACT

The implementation of general elections in Indonesia is carried out by the General Elections Commission (KPU) and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) as national, permanent, and independent state institutions. The independence of these two institutions is a primary requirement in ensuring the implementation of direct, general, free, secret, honest, and fair elections. However, the selection mechanism for KPU and Bawaslu members as stipulated in Law Number 7 of 2017 still leaves room for political intervention, particularly during the fit and proper test stage by the House of Representatives (DPR). The involvement of the DPR at this stage has the potential to affect the objectivity of the assessment because the DPR is a political institution that has a stake in the election results. The phenomenon of the emergence of allegations of determining the names of candidates before the fit and proper test is carried out and the political affiliation of candidates with party elites reinforces concerns about the declining independence of election organizers and the decline of public trust. This research raises two research questions: First, why does the fit and proper test mechanism in the selection of KPU and Bawaslu member candidates affect the independence of election organizers? Second, what is the ideal fit and proper test mechanism in the recruitment of independent and integrity-based candidate members of election organizers? To formulate this problem, the author uses a normative juridical research method, with a conceptual, legislative, and comparative approach. Data sources are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. This study offers an alternative selection mechanism by reducing the number of candidates submitted to the House of Representatives (DPR) to the required number, namely seven candidates for KPU members and five candidates for Bawaslu members. If any candidate does not meet the qualifications, the DPR can request the Selection Team to send the candidate members of KPU and Bawaslu for a fit and proper test by the DPR in accordance with the shortage of the position quota. This model is expected to minimize political intervention while maintaining the principle of checks and balances between state institutions and strengthening the independence of election organizers.

Keywords: *independence of election organizers, KPU and Bawaslu selection, political intervention.*

This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on April, 22st, 2026

Signature 	Examiner I 	Examiner II
Bright Name	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.	Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.

Know, Chair of the Department of Administrative Law: Arfiani, S.H., M.H.

Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer
No. Faculty Alumni	Name: Signature:
No. University Alumni	Name: Signature: